PENGADILAN AGAMA WATAMPONE (307509)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

Laksamana Yos Sudarso

Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018

e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Laksamana Yos Sudarso
Telp. 21018 Fax. 21018
Bone - Sulawesi Selatan 92715
e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pengadilan Agama Watampone yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Watampone, 08 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone

H.A.Fajar Sawerilongi, SE.,M.Si.
NIP. 197412142006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vi

RINGKASAN vii

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ix

NERACA x

LAPORAN OPERASIONAL xii

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 12

A. PENJELASAN UMUM 12

A.1. Dasar Hukum 12

A.3.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 14

5.Dasar Pengukuran 15

A.6.Kebijakan Akuntansi 15

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 21

B.1 Pendapatan 22

B.2 Belanja Pegawai 24

B.3 Belanja Barang 24

B.4 Belanja Modal 25

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 20

C.1 Persediaan 20

C.2 Tanah 20

C.3 Peralatan dan Mesin 29

C.4 Gedung dan Bangunan 29

C.5 Jaringan 30
C.6 Aset Tetap Lainnya 31
C.17 Aset Lain–Lain 31
C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 32
C.19 Utang kepada Pihak Ketiga 32
C.21 Ekuitas 33
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 60
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 60
D.2 Beban Pegawai 60
D.3 Beban Persediaan 61
D.4 Beban Barang dan Jasa 61
D.5.Beban Pemeliharaan 62
D.6Beban Perjalanan Dinas 62
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 63
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional 63
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 65
E.1 Ekuitas Awal 65
E.2Defisit LO 65
E.3Selisih Revaluasi Aset Tetap 65
E.4Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 65
E.5 Transaksi Antar Entitas 65
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 66
E.5.2 Transfer Masuk 66
E.6 Ekuitas Akhir 66
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 68
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 68
F.2. Pengungkapan Lain-Lain 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan ***22***

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018 ..... *Error! Bookmark not defined.*

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2020 .... *Error! Bookmark not defined.*

Tabel 4. PerbandinganRealisasiBelanja TA 2019 dan TA 2018 ..... ***23***

Tabel 5. PerbandinganBelanjaPegawai TA 2019 dan TA 2018 ..... ***24***

Tabel 6. PerbandinganBelanja Barang TA 2019 dan TA 2018 ..... ***25***

Tabel 7. PerbandinganBelanjaModalTA 2019 dan TA 2018 ..... ***25***

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan MesinTA 2019 dan TA 2018 ..... ***26***

Tabel 9. RincianPersediaan ***20***

Tabel 10. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2020 ..... ***26***

Tabel 12. RincianAkumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya ***32***

Tabel 13. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2020 dan ***60***

Tabel 14. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan ***61***

Tabel 15. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan ***61***

Tabel 16. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2018 ..... ***62***

Tabel 17. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2018 ..... ***62***

Tabel 18. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2018 ..... ***63***

Tabel 19. PerbandinganRincian Beban Penyusutan dan Amortisasi ***63***

Tabel 21. Rincian Kegiatan Non Operasional31 Desember 2020 dan ***64***

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone
Telp. 0481-21018 Fax. 0481-21018 e-mail : watampone.pta-makassarkota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Watampone, 08 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran

H.A.FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE.,M.SI
NIP.197412142006041002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.625.195,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp14.672.000,00 atau mencapai 94,28 persen. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp13.287.472.427,00 atau mencapai 93,95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.035.709,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2020. Nilai Aset per Tahun 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp13.179.999.170,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp809,350; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp13.081.480.912,00; Utang Jangka pendek (utang kepada Pihak ketiga) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp97.708.908,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.179.999.170,00 dan Rp13.179.999.170,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.625.123,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.402.675.214,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(13.389.050.091,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.496.272,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(13.387.553.819,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp11.697.766.712,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(13.387.553.819,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp1.595.939.045,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.273.847.232,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp13.179.999.170,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA 2020 DAN TA 2019

URAIAN	CATATAN	TA 2020			TA 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	14.452.000,00	13.625.295,00	94,28	23.581.000,00	23.436.555,00	99,39
Jumlah Pendapatan		**14.452.000,00**	**13.625.295,00**	**94,28**	**23.581.000,00**	**23.436.555,00**	**99,39**
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	12.451.762.000,00	11.596.900.154,00	93,13	12.300.916.000,00	12.300.867.004,00	100,00
2. Belanja Barang	B.3	1.436.267.000,00	1.435.822.273,00	99,97	950.268.000,00	921.863.852,00	97,01
3. Belanja Modal	B.4	255.000.000,00	254.750.000,00	99,90	173.000.000,00	173.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja		**14.143.029.000,00**	**13.287.472.427,00**	**93,95**	**13.424.184.000,00**	**13.395.730.856,00**	**99,79**

NERACA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NERACA
PER 31 Desember 2020 DAN 2019

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 Desember 2020	31 DESEMBER 2019
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	**C**		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid	C. 1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Kas di Bendahara Pengaluaran		-	-
Persediaan	C. 6	809.350,00	873.150,00
Jumlah Aset Lancar		**809.350,00**	**873.150,00**
Aset Tetap			
Tanah	C. 7	5.238.828.000,00	5.238.828.000,00
Peralatan dan Mesin	C. 8	2.379.973.218,00	2.294.973.218,00
Gedung dan Bangunan	C. 9	7.928.483.000,00	6.108.560.000,00
Jalan. Irigasi dan Jaringan	C. 10	19.988.100,00	19.988.100,00
Aset Tetap Lainnya	C. 11	14.997.470,00	14.997.470,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 12	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13	*(2.500.788.876,00)*	*(1.997.040.710,00)*
Jumlah Aset Tetap		**13.081.480.912,00**	**11.680.306.078,00**
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 14	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 15	-	-
Tagihan TP/TGR (*Netto)*		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 16	-	-
Aset Lain-Lain	C. 17	159.211.000,00	120.263.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 18	*(61.502.092,00)*	*(56.726.456,00)*
Jumlah Aset Lainnya		**97.708.908,00**	**63.536.544,00**
JUMLAH ASET		**13.179.999.170,00**	**11.744.715.772,00**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 19	-	46.949.060,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 20	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**-**	**46.949.060,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**-**	**46.949.060,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C. 21	13.179.999.170,00	11.697.766.712,00
JUMLAH EKUITAS		**13.179.999.170,00**	**11.697.766.712,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**13.179.999.170,00**	**11.744.715.772,00**

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN OPERASIONAL
TA 2020 DAN TA 2019

URAIAN	CATATAN	TA 2020	TA 2019
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		13.625.123	23.436.504
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	13.625.123	23.436.504
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	11.559.857.612	12.332.071.813
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	23.133.800	21.329.450
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	978.686.770	605.098.862
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	394.705.185	242.713.500
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	30.950.000	51.340.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	415.341.847	352.853.478
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		13.402.675.214	13.605.407.103
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13.389.050.091)	(13.581.970.599)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.839.722	98.651
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.343.450	42.500
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.496.272	56.151
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	1.496.272	56.151
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(13.387.553.819)	(13.581.914.448)

LAPORAN

PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2020 DAN 2019

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	11.697.766.712,00	11.736.484.669,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(13.387.553.819,00)	(13.581.914.448)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		1.595.939.045,00	-
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		1.595.939.045,00	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	1.488.041.000,00	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	107.898.045,00	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	13.273.847.232,00	13.543.196.491
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.482.232.458,00	(38.717.957)
EKUITAS AKHIR	E. 7	***13.179.999.170,00***	***11.697.766.712***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Watampone Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Watampone Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG".

Visi Pengadilan Agama Watampone mewujudkan :

a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas;
b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai;
c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi Pengadilan Agama Watampone:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Watampone yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien;
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan;
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan professional;
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas;
9. Meningkatkan penatausahaan aset Negara;
10. Meningkatkan pelayanan adaministrasi.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Watampone menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

5.Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Watampone dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi

6.Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan KeuanganTahun 2019(*Audited*)telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Watampone yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Watampone.Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRAdisajikan menurutklasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji;
  - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatandisajikan menurutklasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisas;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Watampone telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	31 Desember 2020	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	14.452.000	14.452.000
Jumlah Pendapatan	14.452.000	14.452.000
Belanja		
Belanja Pegawai	12.451.762.000	12.451.762.000
Belanja Barang	1.388.947.000	1.436.267.000
Belanja Modal	195.000.000	255.000.000
Jumlah Belanja	14.035.709.000	14.143.029.000

Realisasi Pendapatan Rp13.625.195,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.625.195,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.672.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2020		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.451.000,00	11.975.123,00	82
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	72,00	0
425999	Pendapatan Anggaran Lai-Lain	-	1.650.000,00	0
Jumlah Pendapatan Bruto		**14.451.000,00**	**13.625.195,00**	**94**
Pengembalian		**-**	**-**	**0**
Jumlah Pendapatan Netto		**14.451.000,00**	**13.625.195,00**	**94**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Realisasi belanja periode 31 Desember 2020 secara umum mengalami penurunan sebesar Rp.136.711.573,00 atau sebesar 1,02% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya mutasi hakim dan tidak terbayarnya Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2020 untuk Hakim sehingga belanja pegawai mengalami penurunan.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. PerbandinganRealisasiBelanja TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	11.596.900.154,00	12.300.916.000,00	(704.015.846,00)	(5,72)
52	Belanja Barang	1.435.822.273,00	950.268.000,00	485.554.273,00	51,10
53	Belanja Modal	254.750.000,00	173.000.000,00	81.750.000,00	47,25
Jumlah Belanja Netto		**13.287.472.427,00**	**13.424.184.000,00**	**(136.711.573,00)**	**(1,02)**

Belanja Pegawai Rp11.596.900.154,00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.596.900.154,00 dan Rp12.300870.405,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp703.969.981,00 atau 5,72% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena pada Tahun ini Ketua, Wakil Ketua dan Hakim tidak memperoleh Tunjangan Hari Raya.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Belanja PegawaiSemester I TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.984.607.960,00	3.093.162.520,00	(108.554.560,00)	(3,51)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.659,00	39.188,00	(1.529,00)	(3,90)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	226.468.680,00	234.401.080,00	(7.932.400,00)	(3,38)
Belanja Tunj. Anak PNS	54.044.622,00	62.175.334,00	(8.130.712,00)	(13,08)
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	40.320.000,00	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.372.660.000,00	6.831.740.000,00	(459.080.000,00)	(6,72)
Belanja Tunj. PPh PNS	958.749.063,00	1.083.730.643,00	(124.981.580,00)	(11,53)
Belanja Tunj. Beras PNS	110.947.440,00	115.292.640,00	(4.345.200,00)	(3,77)
Belanja Uang Makan PNS	439.755.000,00	416.459.000,00	23.296.000,00	5,59
Belanja Tunjangan Umum PNS	2.960.000,00	3.700.000,00	(740.000,00)	(20,00)
Belanja Pegawai (Tunjangan Kemahalan Haim)	406.350.000,00	419.850.000,00	(13.500.000,00)	(3,22)
Realisasi Belanja Bruto	**11.596.900.424,00**	**12.300.870.405,00**	**(703.969.981,00)**	**(5,72)**
Pengembalian	**(270,00)**	**(3.401,00)**	**3.131,00**	**(92,06)**
Realisasi Belanja Netto	**11.596.900.154,00**	**12.300.867.004,00**	**(703.966.850,00)**	**(5,72)**

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang Rp1.435.822.273,00

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.435.822.273,00 dan Rp921.863.852,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesarRp513.958.421,00 atau 55,75% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan Karena :

1. Pada Tahun 2020, terdapat Pemeliharaan Rumah Dinas;
2. Pada Tahun 2020, Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim full selama 1 tahun
3. Pada Tahun 2020, terdapat Anggaran Belanja Tambahan Pemeliharaan Gedung;

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA. 2019	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	670.733.279,00	436.416.988,00	234.316.291,00	53,69
Belanja Barang Non Operasional	-	15.100.000,00	(15.100.000,00)	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	31.055.800,00	27.457.000,00	3.598.800,00	13,11
Belanja Jasa	317.860.009,00	169.857.864,00	148.002.145,00	87,13
Belanja Pemeliharaan	385.223.185,00	236.792.000,00	148.431.185,00	62,68
Belanja Perjalanan Dinas	30.950.000,00	36.240.000,00	(5.290.000,00)	(14,60)
Realisasi Belanja Bruto	**1.435.822.273,00**	**921.863.852,00**	**513.958.421,00**	**55,75**
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	**1.435.822.273,00**	**921.863.852,00**	**513.958.421,00**	**55,75**

Belanja Modal Rp254.750.000,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp254.750.000,00 dan Rp4.000.000,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesarRp81.750.000,00 atau 47,25% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya Realisai Belanja Modal berupa Penambahan Daya Listrik, Pengadaan Pengolah Data dan Pengadaan CCTV.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	169.750.000,00	-	169.750.000,00	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	173.000.000,00	(88.000.000,00)	(50,87)
Realisasi Belanja Bruto	**254.750.000,00**	**173.000.000,00**	**81.750.000,00**	**47,25**
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	**254.750.000,00**	**173.000.000,00**	**81.750.000,00**	**47,25**

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp85.000.000,00 dan

Rp173.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp88.000.000,00 atau 50,87% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2020 berupa :

- Pengadaan P.C. Komputer untuk Panitera sebanyak 2 unit @ Rp.12.500.000,-
- Pengadaan CCTV sebanyak 1 paket sebesar Rp.60.000.000,-

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	173.000.000,00	(88.000.000,00)	(50,87)
Realisasi Belanja Bruto	**85.000.000,00**	**173.000.000,00**	**(88.000.000,00)**	**(50,87)**
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	**85.000.000,00**	**173.000.000,00**	**(88.000.000,00)**	**(50,87)**

B.4.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp169.750.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami Kenaikan sebesar Rp169.750.000,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Juni 2019. Hal ini disebabkan karena adanya Belanja Modal Penambahan Daya Listrik Pada Tahun 2020 dan terealisasi pada Tahun 2020.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan MesinTA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	169.750.000,00	-	169.750.000,00	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	**169.750.000,00**	-	**169.750.000,00**	**#DIV/0!**
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	**169.750.000,00**	-	**169.750.000,00**	**#DIV/0!**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp809.350,00

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp809.350,00 dan Rp873.150,00, terjadi penurunan sebesar Rp63.800,00 atau 7,30%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. RincianPersediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	Mutasi	30 Juni 2020
1	Barang Konsumsi	873.150,00	623.350,00	1.496.500,00
Jumlah		**873.150,00**	**623.350,00**	**1.496.500,00**

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor: W20-A2/3313/OT.00/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020.

Tanah

Rp5.238.828.000,00

C.2 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Watamponeper 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.238.828.000,00 dan Rp5.238.828.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	**5.238.828.000,00**
Mutasi tambah:	**0,00**
Mutasi kurang:	**0,00**
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	**5.238.828.000,00**

Tabel 9. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2020

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Nomor 13, taanggal 10 Nopember 2014	Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watapone	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	3.424	1.122.240.000,00
Jumlah Halaman I					**3.424**	**1.122.240.000,00**

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Jumlah Halaman I					**3.424**	**1.122.240.000,00**
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	Nomor 14, tanggal 22 Desember 1982	Jl. Lak. Yos Sudarso No. 20 Watampone	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	1.308	460.000,00
Jumlah Halaman II					**1.308**	**460.000,00**
Jumlah Halaman I dan II					**4.732**	**1.122.700.000,00**

Peralatan dan Mesin Rp2.379.973.218,00

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2018 adalah Rp2.379.973.218,00 dan Rp2.294.973.218,00, terjadi kenaikan sebesar Rp85.000.000,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	2.294.973.218
Pembelian	85.000.000
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk	-
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Jumlah Mutasi Tambah	**85.000.000**
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Normalisasi BMN	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**85.000.000**
Saldo per 30 Juni 2020	2.379.973.218
Akumulasi Penyusutan	(1.909.325.222)
Nilai Buku	**470.647.996**

Terdapat mutasi tambah pada periode ini berupa :

1. Pengadaan P.C. Komouter Untuk Panitera sebanyak 2 Unit @Rp.12.500.000 = Rp.25.000.000,00.
2. Pengadaan CCTV sebanyak 1 paket Rp.60.000.000,00.

Gedung dan Bangunan Rp.7.928.483.000,00

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunanper 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp7.928.483.000,00 dan Rp*6.108.560.000*,00. terjadi kenaikan sebesar Rp1.819.923.000,00 atau 3,70%

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	6.108.560.000
Pengembangan	2.653.444.000
Pengembangan Melalui KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Jumlah Mutasi Tambah	**2.653.444.000**
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Penggunaan BMN	833.521.000
Jumlah Mutasi Kurang	**833.521.000**
Jumlah Mutasi	**1.819.923.000**
Saldo per 31 Desember 2019	7.928.483.000
Akumulasi Penyusutan	(588.965.144)
Nilai Buku	**7.339.517.856**

Mutasi tambah yang terjadi pada Pengadilan Agama Watampone disebabkan :

1. Adanya penambahan Daya Listrik
2. Adanya penambahan 1 unit Tempat Ibadah Permanen, Hasil dari Revaluasi Ulang KPKNL Pare-Pare
3. Adanya Revaluasi Ulang dari KPKNL Pare-Pare

Mutasi Kurang Terjadi Karena

Adanya Revaluasi Ulang dari KPKNL Pare-Pare

C.5 Jaringan

Jaringan Rp19.988.100,00

Saldo Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.988.100,00dan Rp19.988.100,00.

Mutasi nilai Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	19.988.100
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo per 30 Juni 2020	19.988.100
Akumulasi Penyusutan	(2.498.510)
Nilai Buku	**17.489.590**

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada asset Jaringan.

Aset Tetap LainnyaRp14.997.470,00

C.6 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp14.997.470,00 dan Rp14.997.470,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	14.997.470
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	**-**
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	**-**
Jumlah Mutasi	**-**
Saldo per 30 Juni 2020	14.997.470
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	**14.997.470**

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Watampone

Aset Lain-Lain Rp159.211.000,00

C.17 Aset Lain–Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp159.211.000,00 dan Rp120.263.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp38.948.000 atau 32,38%

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	120.263.000,00
Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan	105.966.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**105.966.000,00**
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	67.018.000,00
Penghapusan BMN yang dihentikan	-
Jumlah Mutasi Kurang	**67.018.000,00**
Jumlah Mutasi	**38.948.000,00**
Saldo per 30 Juni 2020	159.211.000,00

Terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang :

Mutasi tambah :

- Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan berupa pagar, disebabkan Administrasi Revaluasi Ulang BMN Tahun 2020

Mutasi Kurang :

- Penghentian BMN dari Penggunaanya karena Rusak Berat

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(61.502.092,00)

C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp*(61.502.092,00)* dan Rp(56.726.456,00), terjadi kenaikan sebesar Rp(4.775.636,00) atau 8,41%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 10. RincianAkumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Lain-Lain	159.211.000,00	(61.502.092,00)	97.708.908,00
Jumlah		**159.211.000,00**	**(61.502.092,00)**	**97.708.908,00**

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp0,00

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp26.949.060,00. Tidak terdapat Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	-	Kekurangan Gaji, Tunjangan Khusus Kinerja, dan Uang Makan yang belum dibayarkan di tahun 2019
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	Kekurangan biaya Internet, listrik, air, dan telepon yang belum dibayarkan di tahun 2019
Jumlah		**-**	

C.20 Ekuitas

Ekuitas Rp11.730.232.237,00

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.730.232.237,00 dan Rp11.697.766.712,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp13.625.123,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.625.123,00 dan Rp23.436.504,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 11. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	11.975.123,00	11.141.504,00	7,48
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		11.975.123,00	11.141.504,00	7,48
Pendapatan Lain-Lain				
1	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	12.295.000,00	(100,00)
2	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1.650.000,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		1.650.000,00	12.295.000,00	(86,58)
Total		**13.625.123,00**	**23.436.504,00**	(41,86)

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone Jl. Lak. Yos Sudarso No. 20 Watampone dan Pengembalian Tunjangan Papua, (Hakim mutasi dari Papua).

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp11.559.857.612,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.559.857.612,00 dan Rp12.332.071.813,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA. 2020	TA. 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	2.984.189.260,00	3.092.187.420,00	(3,49)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	37.377,00	35.756,00	4,53
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	226.444.730,00	234.285.650,00	(3,35)
4	Beban Tunj. Anak PNS	54.035.042,00	62.129.162,00	(13,03)
5	Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	40.320.000,00	-
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	6.372.660.000,00	6.828.140.000,00	(6,67)
7	Beban Tunj. PPh PNS	926.515.763,00	1.115.315.185,00	(16,93)
8	Beban Tunj. Beras PNS	110.947.440,00	115.292.640,00	(3,77)
9	Beban Uang Makan PNS	435.398.000,00	420.816.000,00	3,47
10	Beban Tunjangan Umum PNS	2.960.000,00	3.700.000,00	(20,00)
11	Beban Tunjanga Kemahalan Hakim	406.350.000,00	419.850.000,00	(3,22)
Total		**11.559.857.612,00**	**12.332.071.813,00**	**(6,26)**

Beban Persediaan Rp23.133.800,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.133.800,00 dan Rp21.329.450,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	23.133.800,00	21.329.450,00	8,46
2	Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	-
Total		**23.133.800,00**	**21.329.450,00**	**8,46**

Beban Barang dan Jasa Rp978.686.770,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp978.686.770,00 dan Rp605.098.862,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	566.321.779,00	351.907.781,00	60,93
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.185.000,00	1.064.500,00	11,32
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.960.000,00	57.960.000,00	-
4	Beban Barang Operasional Lainnya	29.916.000,00	22.855.707,00	30,89
5	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	13.670.000,00	0,00	#DIV/0!
6	Beban Langganan Listrik	79.996.341,00	78.300.721,00	2,17
7	Beban Langganan Telepon	840.750,00	1.150.953,00	(26,95)
8	Beban Langganan Air	11.176.900,00	10.309.200,00	8,42
9	Beban Sewa	217.620.000,00	81.550.000,00	166,85
Total		**978.686.770,00**	**605.098.862,00**	**61,74**

D.5.Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp394.705.185,00

Beban pemeliharaanpada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp394.705.185,00 dan Rp242.714.500,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222.418.500,00	148.276.000,00	50,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.500.000,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	78.300.000,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.004.685,00	88.516.000,00	(6,23)
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	9.482.000,00	5.921.500,00	60,13
Total		**394.705.185,00**	**242.713.500,00**	**62,62**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp30.950.000,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp30.950.000,00 dan Rp51.340.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	30.950.000,00	51.340.000,00	(39,72)
Total		**30.950.000,00**	**51.340.000,00**	**(39,72)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp415.341.847,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp415.341.847,00 dan Rp352.853.478,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. PerbandinganRincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2010	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	212.750.288,00	201.379.564,00	5,65
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	199.845.311,00	149.233.484,00	33,91
3	Beban Penyusutan Jaringan	499.702,00	499.702,00	-
4	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidag digunakan dala Operasional Pemerintah	2.246.546,00	1.740.728,00	-
Jumlah Penyusutan		**415.341.847,00**	**352.853.478,00**	**17,71**
		0,00	0,00	-
Jumlah Amortisasi		**0,00**	**0,00**	**-**
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	-
Total		**415.341.847,00**	**352.853.478,00**	**17,71**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp1.496.272,00

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

0

Tabel 18. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	72,00	51,00	41,18
2	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.839.650,00	98.600,00	2.779,97
3	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	(1.343.450,00)	(42.500,00)	3.061,06
Total		**1.496.272,00**	**56.151,00**	**2.564,73**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp11.697.766.712,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.697.766.712,00 dan Rp11.736.484.669,00.

E.2Defisit LO

Defisit LO Rp(13.387.553.819,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar Rp(13.387.553.819,00) dan Rp(13.581.914.448,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp1.488.041.000,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.488.041.000,00 dan Rp0,00.

E.4Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp107.898.045,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp107.898.045,00 danRp0,00.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp13.273.847.232,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.273.847.232,00 dan Rp13.543.196.491,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.287.472.427,00
Diterima dari Entitas Lain	(13.625.195,00)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
T O T A L	**13.273.847.232,00**

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar (Rp13.625.195,00) sedangkan DKEL sebesar Rp13.287.472.427,00.

E.5.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Rincian Transfer Masuk terlampir dalam Calbmn.

Ekuitas Akhir Rp13.179.999.170,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.179.999.170,00 dan Rp11.697.766.712,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara per 31 Desember 2020 pada Pengadilan Agama Watampone yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watamponeuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Watampone adalah:
    1. BRI Cab. Watampone A/C 0111-01-000120-30-6 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,- (Nol rupiah)
    2. BRI A/C 00000111-01-001515-30-0 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
    3. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.278.955.000 (Dua ratus Tujuh puluh Delapan ribu Sembilan ratus Lima puluh Lima ribu rupiah)

2. Revisi DIPA

    DIPA pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2020 bernomor : DIPA-005.01-1.307509/2020 tanggal 06 Desember 2019 berjumlah sebesar Rp14.035.709.000,00 (Empat belas Milyar Tiga puluh Lima juta Tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) setelah mengalami 7 (tujuh) kali revisi, maka Pagu DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.14.143.029.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

    a. DIPA Awal = Rp.14.035.709.000,00

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1064.994.001	511111	2,300,000,000
	511119	39,000
	511121	198,669,000

	511122	50,333,000
	511123	40,320,000
	511124	7,100,000,000
	511125	1,625,911,000
	511126	121,862,000
	511129	510,312,000
	511151	12,916,000
	511157	491,400,000
1064.994.002	521111	566,615,000
	521114	970,000
	521115	57,960,000
	521119	20,900,000
	521811	24,500,000
	522111	91,440,000
	522112	2,400,000
	522113	11,448,000
	522141	234,000,000
	523111	140,320,000
	523119	78,300,000
	523121	92,611,000
	524111	51,340,000
	524119	16,143,000
1071.951	532111	25,000,000
	533121	170,000,000
Total		**14,035,709,000**

b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 13 Pebruari 2020) = Rp.14.035.709.000,00

Tentang perubahan halaman III DIPA dan pergeseran POK. Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1064.994.001	511111	2,300,000,000
	511119	39,000
	511121	198,669,000
	511122	50,333,000
	511123	40,320,000
	511124	7,100,000,000

	511125	1,625,911,000
	511126	121,862,000
	511129	510,312,000
	511151	12,916,000
	511157	491,400,000
1064.994.002	521111	566,615,000
	521114	970,000
	521115	57,960,000
	521119	20,900,000
	521811	24,500,000
	522111	91,440,000
	522112	2,400,000
	522113	11,448,000
	522141	234,000,000
	523111	140,320,000
	523119	78,300,000
	523121	92,611,000
	524111	51,340,000
	524119	16,143,000
1071.951	532111	25,000,000
	533121	170,000,000
Total		**14,035,709,000**

c. Revisi DIPA II (Tanggal 2 Juli 2020)

Tentang pengurangan anggaran oleh BA.BUN berupa bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim menjadi **Rp14.012.309.000,00**

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1064.994.001	511111	2,300,000,000	2,300,000,000
	511119	39,000	39,000
	511121	198,669,000	198,669,000
	511122	50,333,000	50,333,000
	511123	40,320,000	40,320,000
	511124	7,100,000,000	7,100,000,000
	511125	1,625,911,000	1,625,911,000
	5111126	121,862,000	121,862,000
	5111129	510,312,000	510,312,000
	5111151	12,916,000	12,916,000

	5111157	491,400,000	491,400,000
1064.994.002	**521111**	**566,615,000**	**570.291.000**
	521114	970,000	970,000
	521115	57,960,000	57,960,000
	521119	**20,900,000**	**27.224.000**
	521811	24,500,000	24,500,000
	522111	91,440,000	91,440,000
	522112	2,400,000	2,400,000
	522113	11,448,000	11,448,000
	522141	**234,000,000**	**210.600.000**
	523111	140,320,000	140,320,000
	523119	78,300,000	78,300,000
	523121	**92,611,000**	**82.611.000**
	524111	51,340,000	51,340,000
	524119	16,143,000	16,143,000
1071.951	532111	25,000,000	25,000,000
	533121	170,000,000	170,000,000
Total		**14,035,709,000**	**14.012.309.000**

d. Revisi DIPA III (Tanggal 6 Agustus 2020) = **Rp14.012.309.000,00** (Tidak terdapat perubahan pagu)

Tentang perubahan Halaman III DIPA dan pergeseran POK

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1064.994.001	511111	2,300,000,000	2,300,000,000
	511119	39,000	39,000
	511121	198,669,000	198,669,000
	511122	50,333,000	50,333,000
	511123	40,320,000	40,320,000
	511124	7,100,000,000	7,100,000,000
	511125	1,625,911,000	1,625,911,000
	5111126	121,862,000	121,862,000
	5111129	510,312,000	510,312,000
	5111151	12,916,000	12,916,000
	5111157	491,400,000	491,400,000
1064.994.002	**521111**	**566,615,000**	**566.755.000**
	521114	**970,000**	**1.170.000**

	521115	57,960,000	57,960,000
	521119	**20,900,000**	**28.724.000**
	521131	**0**	**13.197.000**
	521811	**24,500,000**	**25.850.000**
	522111	**91,440,000**	**93.984.000**
	522112	**2,400,000**	**960.000**
	522113	11,448,000	11,448,000
	522141	**234,000,000**	**210.600.000**
	523111	**140,320,000**	**146.396.000**
	523114	**0**	**1.500.000**
	523119	78,300,000	78,300,000
	523121	**92,611,000**	**75.363.000**
	524111	51,340,000	51,340,000
	524119	**16,143,000**	**0**
1071.951	532111	25,000,000	25,000,000
	533121	170,000,000	170,000,000
Total		**14,035,709,000**	**14.012.309.000**

e. Revisi DIPA IV (Tanggal 28 September 2020) = **Rp14.012.309.000,00** (Tidak terdapat perubahan pagu)

Tentang perubahan Halaman III DIPA dan pergeseran POK

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1064.994.001	511111	2,300,000,000	2,300,000,000
	511119	39,000	39,000
	511121	198,669,000	198,669,000
	511122	50,333,000	50,333,000
	511123	40,320,000	40,320,000
	511124	7,100,000,000	7,100,000,000
	511125	1,625,911,000	1,625,911,000
	5111126	121,862,000	121,862,000
	5111129	510,312,000	510,312,000
	5111151	12,916,000	12,916,000
	5111157	491,400,000	491,400,000
1064.994.002	**521111**	**566,615,000**	**568.340.000**
	521114	**970,000**	**1.533.000**
	521115	57,960,000	57,960,000
	521119	**20,900,000**	**30.164.000**

	521131	**0**	**13.197.000**
	521811	**24,500,000**	**30.240.000**
	522111	**91,440,000**	**90.000.000**
	522112	**2,400,000**	**960.000**
	522113	11,448,000	11,448,000
	522141	**234,000,000**	**217.626.000**
	523111	**140,320,000**	**148.164.000**
	523114	**0**	**1.500.000**
	523119	78,300,000	78,300,000
	523121	**92,611,000**	**79.875.000**
	524111	51,340,000	36.240.000
	524119	**16,143,000**	**0**
1071.951	532111	25,000,000	25,000,000
	533121	170,000,000	170,000,000
Total		**14,035,709,000**	**14.012.309.000**

f. Revisi DIPA V (Tanggal 27 Oktober 2020)

Tentang Penambahan Anggaran dari BA.BUN berupa pengadaan CCTV sebesar Rp.60.000.000,00, ***menjadi Rp.14.072.309.000,00***

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1064.994.001	511111	2,300,000,000	2,300,000,000
	511119	39,000	39,000
	511121	198,669,000	198,669,000
	511122	50,333,000	50,333,000
	511123	40,320,000	40,320,000
	511124	7,100,000,000	7,100,000,000
	511125	1,625,911,000	1,625,911,000
	5111126	121,862,000	121,862,000
	5111129	510,312,000	510,312,000
	5111151	12,916,000	12,916,000
	5111157	491,400,000	491,400,000
1064.994.002	**521111**	**566,615,000**	**568.066.000**
	521114	**970,000**	**1.350.000**
	521115	57,960,000	57,960,000
	521119	**20,900,000**	**29.916.000**
	521131	**0**	**13.197.000**
	521811	**24,500,000**	**30.960.000**

	522111	**91,440,000**	**89.400.000**
	522112	**2,400,000**	**960.000**
	522113	**11,448,000**	**11.73.,000**
	522141	**234,000,000**	**217.626.000**
	523111	**140,320,000**	**151.700.000**
	523114	**0**	**1.500.000**
	523119	78,300,000	78,300,000
	523121	**92,611,000**	**79.639.000**
	524111	**51,340,000**	**33.220.000**
	524119	**16,143,000**	**0**
1071.951	**532111**	**25,000,000**	**85,000,000**
	533121	170,000,000	170,000,000
Total		**14,035,709,000**	**14.012.309.000**

g. Revisi DIPA VI (Tanggal 1 Desember 2020)

Tentang Penambahan Anggaran dari BA.BUN berupa pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp.70.720.000,00 ***menjadi Rp.14.143.029.000,00***

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1064.994.001	511111	2,300,000,000	2,300,000,000
	511119	39,000	39,000
	511121	198,669,000	198,669,000
	511122	50,333,000	50,333,000
	511123	40,320,000	40,320,000
	511124	7,100,000,000	7,100,000,000
	511125	1,625,911,000	1,625,911,000
	5111126	121,862,000	121,862,000
	5111129	510,312,000	510,312,000
	5111151	12,916,000	12,916,000
	5111157	491,400,000	491,400,000
1064.994.002	**521111**	**566,615,000**	**568.004.000**
	521114	**970,000**	**1.185.000**
	521115	57,960,000	57,960,000
	521119	**20,900,000**	**29.916.000**
	521131	**0**	**13.670.000**
	521811	**24,500,000**	**31.056.000**
	522111	**91,440,000**	**87.444.000**
	522112	**2,400,000**	**900.000**

	522113	**11,448,000**	**11.904.000**
	522141	**234,000,000**	**217.626.000**
	523111	**140,320,000**	**222.420.000**
	523114	**0**	**1.500.000**
	523119	78,300,000	78,300,000
	523121	**92,611,000**	**83.431.000**
	524111	**51,340,000**	**30.951.000**
	524119	**16,143,000**	**0**
1071.951	**532111**	**25,000,000**	**85,000,000**
	533121	170,000,000	170,000,000
Total		**14,035,709,000**	**14.143.029.000**

h. Revisi DIPA VII (Tanggal 22 Desember 2020) = 14.143.029.000 (Tidak terdapat perubahan pagu)
Tentang Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.01			
1064.994.001	**511111**	**2,300,000,000**	**2.985.183.000**
	511119	39,000	39,000
	511121	**198,669,000**	**226.530.000**
	511122	**50,333,000**	**54.064.000**
	511123	40,320,000	40,320,000
	511124	**7,100,000,000**	**6.391.252.000**
	511125	**1,625,911,000**	**1.617.884.000**
	5111126	121,862,000	121,862,000
	5111129	510,312,000	510,312,000
	5111151	12,916,000	12,916,000
	5111157	491,400,000	491,400,000
1064.994.002	**521111**	**566,615,000**	**568.004.000**
	521114	**970,000**	**1.185.000**
	521115	57,960,000	57,960,000
	521119	**20,900,000**	**29.916.000**
	521131	**0**	**13.670.000**
	521811	**24,500,000**	**31.056.000**
	522111	**91,440,000**	**87.444.000**
	522112	**2,400,000**	**900.000**
	522113	**11,448,000**	**11.904.000**
	522141	**234,000,000**	**217.626.000**

	523111	**140,320,000**	**222.420.000**
	523114	**0**	**1.500.000**
	523119	78,300,000	78,300,000
	523121	**92,611,000**	**83.431.000**
	524111	**51,340,000**	**30.951.000**
	524119	**16,143,000**	**0**
1071.951	**532111**	**25,000,000**	**85,000,000**
	533121	170,000,000	170,000,000
Total		**14,035,709,000**	**14.143.029.000**

3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian aplikasi SAIBA 2019.

   Jurnal Penyesuaian

   - Pada tanggal 2 Januari 2020 merupakan jurnal balik dari penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran Yang Lalu;
   - Pada tanggal 30 Desember 2020 merupakan Jurnal Utang kepada Pihak Ketiga berupa :
     - Belanja Pegawai
     - Belanja Langganan Listrik
     - Belanja Langganan Telepon
     - Belanja Langganan Air

4. Terdapat perbaikan Transaksi SPM sebanyak 2 kali
   - Pada tanggal 18 Agustus 2020, terjadi koreksi SPM, Nomor :0038T/307509/2020 tanggal 27 maret 2020, semula Akun 521119 (Belanja barang Operasional lainnya) menjadi Akun 521131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp.380.000,00.
   - Pada tanggal 19 Agustus 2020, terjadi koreksi SPM, Nomor :0042T/307509/2020 tanggal 27 Maret 2020, semula Akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) menjadi Akun 521131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp.750.000,00
   - Pada tanggal 19 Agustus 2020, terjadi koreksi SPM, Nomor :0065T/307509/2020 tanggal 15 Mei 2020, semula Akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) menjadi Akun 521131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp.1.827.500,00

- Pada tanggal 17 Desember 2020, terjadi koreksi SPM dengan nomor : 00135T/307509/2020 tanggal 12 Oktober 2020 semula Akun 511138 (Belanja Pegawai berupa pengembalian Tunjangan Khusus Papua) menjadi Akun 425999 (Pengembalian Pendapatan Lain-Lain) sebesar Rp. 1.650.000,00

5. Laporan Keuangan Perkara per 31 Desember 2021

Keadaan keuangan Perkara pada Bulan Desember tahun 2020

Saldo Awal :

Biaya Perkara	: Rp.336.676.000,00
Biaya Eksekusi	: Rp.28.095.000,00
Biaya Konsinyasi	: Rp. 0,00
Uang Titipan Perkara	: Rp.0,00

Penerimaan :

Biaya Perkara	: Rp.205.256.000,00
Biaya Eksekusi	: Rp.0,00
Biaya Konsinyasi	: Rp.0,00
Uang Titipan Perkara	: Rp.0,00

Pengeluaran :

Biaya Perkara	: Rp.272.915.000,00
Biaya Eksekusi	: Rp.6.775..000,00
Biaya Konsinyasi	: Rp.0,00
Uang Titipan Perkara	: Rp.0,00

Saldo Akhir :

Biaya Perkara	: Rp.269.017.000,00
Biaya Eksekusi	: Rp.21.340.000,00
Biaya Konsinyasi	: Rp.0,00
Uang Titipan Perkara	: Rp.0,00

Kas di Bank :

Biaya Perkara	: Rp.236.502.000,00
Biaya Eksekusi	: Rp.21.340.000,00
Biaya Konsinyasi	: Rp.0,00
Uang Titipan Perkara	: Rp.0,00

Kas di Brankas :

Biaya Perkara : Rp.32.515.000,00

Biaya Eksekusi : Rp.0,00

Biaya Konsinyasi : Rp.0,00

Uang Titipan Perkara : Rp.0,00

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI., Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal : 2 Desember Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone adalah Sekretaris Pengadilan Agama Watampone yaitu :

H.A.Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/002/KU.00/SK/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatangan SPM dan Staf Pengelola Keuangan :

Pejabat Pembuat Komitmen : Nurhidayah, S.Ag

PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Maftukhah Mustafa, S.Kom

Bendahara : Heriawati, SH

LAMPIRAN A.1
TABEL PENYUSUTAN TA. 2020

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2020						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	**PERALATAN DAN MESIN**		503	2,379,973,218	1,696,574,934	212,750,288	0	1,909,325,222	470,647,996
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	10	455,024,828	455,024,828	0	0	455,024,828	0
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	87	294,493,200	193,834,380	24,595,620	0	218,430,000	76,063,200
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	309	627,649,800	527,031,652	42,718,670	0	569,750,322	57,899,478
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	7	35,131,000	18,008,600	6,027,200	0	24,035,800	11,095,200
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	3	25,345,000	25,345,000	0	0	25,345,000	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	1	149,985,000	59,994,000	14,998,500	0	74,992,500	74,992,500
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	51	568,250,600	278,147,200	98,366,150	0	376,513,350	191,737,250
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	35	224,093,790	139,189,274	26,044,148	0	165,233,422	58,860,368
133111	**GEDUNG DAN BANGUNAN**		11	7,928,483,000	298,466,968	199,845,311	90,652,865	588,965,144	7,339,517,856
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	7	6,915,443,000	223,767,500	175,178,595	117,536,355	516,482,450	6,398,960,550
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	3	720,981,000	63,771,720	16,767,000	-30,237,720	50,301,000	670,680,000
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1	292,059,000	10,927,748	7,899,716	3,354,230	22,181,694	269,877,306
134113	**JARINGAN**		1	19,988,100	1,998,808	499,702	0	2,498,510	17,489,590
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		1	19,988,100	1,998,808	499,702	0	2,498,510	17,489,590
166112	**ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN**		5	159,211,000	56,726,456	2,246,546	2,529,090	61,502,092	97,708,908
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	1	24,975,000	24,975,000	0	0	24,975,000	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	3	28,270,000	28,270,000	0	0	28,270,000	0
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1	105,966,000	3,481,456	2,246,546	2,529,090	8,257,092	97,708,908
TOTAL				10,487,655,318	2,053,767,166	415,341,847	93,181,955	2,562,290,968	7,925,364,350

Watampone, 30 Desember 2020

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang

H. Andi Fajar Siam Sawerigading, SE., M.Si

NIP. 19741214 200604 1 002

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TA. 2020

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal 11-01-2021
Halaman 1
Kode Lap LBSKSSKT

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH SD 1 JANUARI 2020	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH SD 31 DESEMBER	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	
.....	TIDAK ADA DATA	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	

Watampone, 30 Desember 2020
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H. Andi Fajar Siam Sawerilongi, SE.,M.Si
NIP. 19741214.200604.1.002

LAMPIRAN A.3

HIBAH

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
JENIS TRANSAKSI :

Tanggal : 11-01-2021
Halaman : 1
Kode Lap. : DTBSHSSKT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
			0	0
. . . .	TIDAK ADA DATA		0	0
TOTAL				0

Watampone, 30 Desember 2020
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H. Andi Fejar Siam Sawerilongi, SE, M.Si
NIP. 19741214.200604.1.002